

December 2013

Intervensi Militer Indonesia di Timor Portugis 7 Desember 1975: Analisis Kebijakan Luar Negeri pada Level Sistem Internasional, Politik Domestik, dan Individu

Muhamad Arif

Pacivis-Center for Global Civil Society Studies, Universitas Indonesia, mhdarifanwar@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/global>

Recommended Citation

Arif, Muhamad (2013) "Intervensi Militer Indonesia di Timor Portugis 7 Desember 1975: Analisis Kebijakan Luar Negeri pada Level Sistem Internasional, Politik Domestik, dan Individu," *Global: Jurnal Politik Internasional*: Vol. 15 : No. 2 , Article 6.

DOI: 10.7454/global.v15i2.29

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/global/vol15/iss2/6>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Social and Political Sciences at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Global: Jurnal Politik Internasional by an authorized editor of UI Scholars Hub.

**INTERVENSI MILITER INDONESIA DI TIMOR PORTUGIS 7 DESEMBER 1975:
ANALISIS KEBIJAKAN LUAR NEGERI PADA LEVEL SISTEM
INTERNASIONAL, POLITIK DOMESTIK, DAN INDIVIDU**

Muhammad Arif

Pacivis-Center for Global Civil Society Studies, Universitas Indonesia

E-mail: mhdarifanwar@gmail.com

Abstrak

The focus of this study is on Indonesia's option to conduct military intervention as its foreign policy in Timor Portugis on 7 December 1975. The purpose of this study is to identify factors that influence the government of Indonesia to choose military intervention as in the case of Portuguese Timor. This study uses qualitative approach with data gathered from primary as well as secondary sources and, then, analyzed using descriptive-analytical method. This study concludes that the option to conduct military intervention to Timor Portugis on 7 December 1975 is due to three reasons, i.e.: (1) supportive policies of interested countries, (2) political interaction between foreign policy-making actors in Indonesia, and (3) the personality of President Suharto.

Kata kunci:

Foreign policy, military intervention, Timor Portugis, New Order, Suharto

Pendahuluan

Pada tanggal 7 Desember 1975 pasukan yang terdiri dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan sejumlah sipil yang dipersenjatai, dirujuk sebagai “sukarelawan,” menjalankan sebuah operasi militer untuk menguasai Dili, ibukota wilayah yang ketika itu bernama Timor Portugis. Melalui operasi militer yang diberi kode Operasi Seroja ini Indonesia berhasil menguasai kota Dili hanya sehari setelah operasi dimulai.

Penyerbuan ke Timor Portugis merupakan bagian dari rangkaian kebijakan luar negeri Indonesia terhadap masalah Timor Portugis yang telah mulai dijalankan sejak mengemukanya masalah Timor Portugis pada pertengahan tahun 1974. Sebagai sebuah negara dengan pemerintahan berdaulat yang berinteraksi secara simultan dengan lingkungan eksternal, Indonesia tentu saja, hingga pada batasan tertentu, memiliki kebebasan untuk menentukan kebijakan luar negerinya. Terdapat lebih dari satu pilihan kebijakan luar negeri yang bisa diambil dalam menyelesaikan sebuah masalah oleh pemerintahan suatu negara.

Dalam kasus Timor Portugis, pilihan kebijakan luar negeri yang akhirnya diambil oleh pemerintah Indonesia adalah melakukan intervensi militer dan ini menjadi hal yang menarik untuk dikaji karena intervensi militer Indonesia di Timor Portugis adalah satu-satunya kasus dimana Indonesia melakukan sebuah operasi militer terbuka untuk menduduki sebuah wilayah di luar batas negaranya.ⁱ Selain itu, intervensi militer Indonesia di Timor Portugis tanggal 7 Desember 1975 dilakukan di tengah pergeseran arah politik luar negeri Indonesia dari yang sebelumnya cenderung agresif dan berbau ekspansionis semasa pemerintahan Presiden Sukarno menjadi lebih tidak agresif semasa pemerintahan Presiden Suharto.ⁱⁱ

Berdasarkan latar belakang fakta-fakta di atas, menjadi menarik dan signifikan untuk mempertanyakan *mengapa pemerintah Indonesia memilih intervensi militer sebagai kebijakan luar negerinya terhadap Timor Portugis tanggal 7 Desember 1975*. Dengan demikian, tujuan dari tulisan ini adalah untuk memahami pilihan pemerintah Indonesia untuk melakukan intervensi militer sebagai kebijakan luar negerinya terhadap Timor Portugis tanggal 7 Desember 1975. Pemahaman ini diperoleh dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pengambilan pilihan kebijakan luar negeri tersebut.

Tinjauan Teoritis dan Metodologi

Intervensi militer Indonesia ke Timor Portugis tanggal 7 Desember 1975 merupakan satu-satunya kasus dimana Indonesia melakukan sebuah operasi militer terbuka untuk menduduki wilayah di luar batas resmi negaranya. Baik sebelum maupun sesudah kasus ini, hingga saat tulisan ini dibuat, pemerintah Indonesia tidak pernah mengambil pilihan kebijakan luar negeri berupa intervensi militer terbuka di luar teritorinya.ⁱⁱⁱ Selain itu, kasus intervensi militer Indonesia di Timor Portugis tanggal 7 Desember 1975 menjadi salah satu episode penting dalam sejarah politik luar negeri Indonesia karena berbagai dampak kemanusiaan yang diakibatkannya. Meskipun terdapat fakta-fakta ini, belum ada satu pun penelitian sistematis yang berusaha memahami kasus ini dengan melihat faktor-faktor yang mempengaruhinya.^{iv}

Kajian kebijakan luar negeri (*foreign policy analysis*) umumnya dilakukan dengan mengidentifikasi faktor-faktor pada suatu tataran atau level analisis tertentu, yaitu: lingkungan internasional, politik domestik, atau individu pengambil kebijakan, yang mendorong pemerintah suatu negara untuk mengambil kebijakan luar negeri tertentu.^v Untuk

memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap kasus pengambilan pilihan kebijakan luar negeri Indonesia untuk melakukan intervensi militer di Timor Portugis tanggal 7 Desember 1975, tulisan ini menemukan faktor-faktor pendorong di ketiga tataran tersebut sekaligus.

Untuk membantu menemukan data yang relevan serta menganalisa data tersebut, tulisan ini menggunakan konsep intervensi militer dan kebijakan luar negeri. Intervensi militer, salah satunya, dapat didefinisikan sebagai pergerakan kekuatan militer reguler (lintas udara, pendaratan pantai, artileri, dsb.) sebuah negara di dalam wilayah negara lain, dalam konteks isu atau sengketa politik tertentu.^{vi} Sedangkan kebijakan luar negeri dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas yang memiliki tujuan dan didesain untuk mempertahankan atau mengubah kondisi, obyek atau praktek di lingkungan eksternal.^{vii} Selain melalui perdagangan, kebijakan proteksi, pemberian utang, bantuan teknis, bantuan pembangunan dan sebagainya, kebijakan luar negeri juga dapat direfleksikan melalui instrumen intervensi militer. Dalam kerangka definitif inilah kasus intervensi militer Indonesia di Timor Portugis tanggal 7 Desember 1975 dapat dilihat sebagai sebuah kasus pengambilan pilihan kebijakan luar negeri, meskipun pada kenyataannya Timor Portugis ketika itu bukanlah entitas politik berupa negara dalam pemahaman umum.

Tujuan tulisan ini, sebagaimana disebutkan di atas, dipenuhi dengan menggunakan pendekatan kualitatif dalam pengumpulan dan analisa data serta penarikan kesimpulan.^{viii} Data dikumpulkan dari sumber primer berupa sejumlah dokumen pemerintah serta sumber sekunder dari literatur yang tersedia. Dengan bantuan konsep-konsep yang disebutkan di atas, data yang dikumpulkan dianalisa untuk kemudian, secara induktif, ditarik kesimpulan berupa identifikasi faktor-faktor pada tataran lingkungan internasional, politik domestik Indonesia pada masa Orde Baru, serta individu Presiden Suharto yang mempengaruhi pengambilan pilihan kebijakan luar negeri Indonesia untuk melakukan intervensi militer di Timor Portugis tanggal 7 Desember 1975. Selanjutnya, berdasarkan identifikasi faktor-faktor tersebut, dibangun sebuah model abstraksi konseptual mengenai pengambilan pilihan kebijakan luar negeri Indonesia untuk melakukan intervensi militer di Timor Portugis tanggal 7 Desember 1975.

Analisis Intervensi Militer Indonesia di Timor Portugis 7 Desember 1975 pada Level Sistem Internasional, Politik Domestik dan Individu

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, intervensi militer Indonesia di Timor Portugis tanggal 7 Desember 1975 dapat dilihat sebagai bagian dari rangkaian kebijakan luar negeri Indonesia terhadap masalah Timor Portugis. Masalah Timor Portugis sendiri bermula ketika terjadi proses dekolonialisasi di berbagai wilayah jajahan di dunia pasca Perang Dunia II. Terhadap tuntutan di daerah-daerah koloninya, seperti: Angola, Guinea Bissau, Mozambik, Goa dan Timor Portugis, Portugal bersikap resisten. Pemerintahan di Lisabon kemudian menerapkan sejumlah kebijakan untuk memperkuat posisinya di wilayah-wilayah koloninya, diantaranya dengan mulai menjalankan serangkaian rencana pembangunan untuk menghidupkan kembali ekonomi. Meskipun demikian, ketimpangan ekonomi dan sosial tetap terjadi di wilayah-wilayah ini.

Sementara ketimpangan ekonomi dan sosial di wilayah-wilayah koloni Portugal di Afrika berujung pada gerakan bersenjata menuntut kemerdekaan. Timor Portugis harus menunggu lebih lama sebelum akhirnya benar-benar memulai proses dekolonialisasi. Momentum awal dekolonialisasi Timor Portugis adalah kudeta militer di Portugal pada tanggal 25 April 1974 yang kemudian dikenal dengan nama Revolusi Anyelir. Berbeda dengan pendahulunya, Jenderal Antonio Spínola, pemimpin baru Portugal lebih mengutamakan otonomi yang progresif bagi daerah koloni Portugal. Di Timor Portugis, perubahan politik di Portugal segera ditanggapi dengan berdirinya partai-partai politik. Partai-partai politik utama di Timor Portugis ketika itu adalah Uni Demokratik Timor (*União Democrática Timorese/UDT*) yang didirikan pada tanggal 11 Mei 1974, Asosiasi Sosial Demokratik Timor (*Asociação Social Democrata de Timor/ASDT*) yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1974 dan Asosiasi Rakyat Demokratik Timor (*Associação Popular Democrática de Timor/APODETI*), yang didirikan pada tanggal 27 Mei 1974. ASDT sendiri kemudian mengubah namanya menjadi Fron Revolusioner bagi Timor-Leste Merdeka (*Frente Revolucionária de Timor-Leste Independente/FRETILIN*) pada tanggal 11 September 1974. Meskipun terdapat perbedaan pada cara mencapainya, tujuan akhir UDT

dan ASDT/*Fretilin* sesungguhnya serupa, yaitu: kemerdekaan sepenuhnya dari jajahan Portugal dan menolak integrasi dengan Indonesia. Kedua partai politik tersebut bahkan sempat membangun koalisi pada tanggal 21 Januari 1975 dengan komitmen bersama untuk kemerdekaan sepenuhnya Timor Portugis, penolakan terhadap *Apodeti* dan intergrasi dengan Indonesia, dan pendirian pemerintahan transisional di mana kedua partai tersebut berperan. Akan tetapi, karena friksi antara kedua partai, koalisi ini pecah pada bulan Mei 1975. Bahkan, akhirnya ketegangan antara UDT dan *Fretilin* justru menjadi salah satu aspek terpenting yang membentuk masalah Timor Portugis.

Pada tanggal 11 Agustus 1975, UDT melancarkan sebuah gerakan bersenjata untuk menguasai Timor Portugis. Oleh pemimpin partai, gerakan ini diklaim bertujuan bukan untuk mengambilalih kekuasaan melainkan untuk meluruskan kembali proses dekolonialisasi yang dipercaya UDT telah dibajak oleh elemen-elemen “ambisius, tidak bertanggungjawab, dan bermasuk buruk,” dan untuk mencegah kudeta *Fretilin*, yang konon direncanakan pada 15 Agustus 1975.^{ix} *Fretilin* memang kemudian melancarkan gerakan bersenjata balasan pada tanggal 15 Agustus 1975. Setelah gerakan bersenjata *Fretilin* ini, konflik internal semakin memuncak di Timor Portugis dan memakan korban hingga ribuan jiwa.^x

Indonesia merespon perkembangan masalah Timor Portugis dengan serangkaian kebijakan luar negeri. Meskipun pejabat-pejabat pemerintah Indonesia sempat memberikan tanggapan terhadap perkembangan masalah Timor Portugis dalam konteks arus dekolonialisasi, Indonesia baru aktif merespon perkembangan masalah Timor Portugis sejak pertengahan tahun 1974, yaitu ketika terjadi Revolusi Anyelir di Portugal dan partai-partai politik berdiri di Timor Portugis. Rangkaian kebijakan luar negeri Indonesia di Timor Portugis dijalankan secara dinamis sesuai dengan perkembangan situasi. Jika diamati perkembangannya, kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh Indonesia terhadap masalah Timor Portugis tahun 1974-1975 terletak pada sebuah spektrum, dengan satu titik ekstrim berupa pendekatan diplomatis dan titik ekstrim yang lain berupa pendekatan militer dengan intervensi terbuka. Pada masa-masa awal keterlibatannya, kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Timor Portugis lebih tepat dikatakan menggunakan pendekatan diplomatis dengan menjalin komunikasi dengan negara-negara yang berkepentingan, yaitu: Portugal, Amerika Serikat dan Australia. Selain itu, pada masa ini, pemerintah Indonesia berusaha menegaskan komitmennya perihal proses dekolonialisasi Timor Portugis yang berlangsung sesuai dengan

aspirasi rakyat Timor Portugis sendiri. Terhitung paling tidak sejak Mei 1975, pendekatan diplomatis mulai dikombinasikan dengan pendekatan intelijen. Sejak itu, sambil terus menjalin komunikasi diplomatik, pemerintah Indonesia mulai berusaha mempengaruhi perkembangan di Timor Portugis dengan memberikan otorisasi operasi-operasi penyusupan dan penggalangan dukungan terhadap integrasi dengan Indonesia. Hingga akhirnya pada tanggal 7 Desember 1975, titik ekstrim lain dari spektrum kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Timor Portugis dicapai; Indonesia melakukan intervensi militer di Timor Portugis.

Salah satu tataran dimana diduga terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan pilihan kebijakan luar negeri Indonesia untuk melakukan intervensi militer di Timor Portugis tanggal 7 Desember 1975 adalah tataran internasional. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja di tataran internasional yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia tersebut, tulisan ini bergerak dari satu titik mula yakni kondisi-kondisi dan kejadian-kejadian pada sistem internasional pada masa-masa pasca Perang Dunia II, menjelang, dan saat pengambilan pilihan kebijakan luar negeri Indonesia untuk melakukan intervensi di Timor Portugis tanggal 7 Desember 1975.^{xi}

Setelah berakhirnya Perang Dunia II, terjadi perubahan dalam sistem internasional. Perubahan ini menyangkut distribusi kekuatan dalam sistem internasional.^{xii} Pasca Perang Dunia II, Amerika Serikat dan Uni Soviet muncul sebagai dua kekuatan utama dalam struktur internasional ketika itu.^{xiii} Keberadaan dua kekuatan yang relatif seimbang ini menciptakan struktur internasional yang bipolar. Terdapat sejumlah konsekuensi logis dari sistem internasional yang bipolar ini, antara lain: (1) sistem internasional menjadi stabil, (2) pola aliansi menjadi stabil, dan (3) ideologi menjadi relevan dalam pemilihan aliansi. Nyatanya memang tidak pernah terjadi perang langsung antara *great powers* selama Perang Dingin.^{xiv}

Setelah melewati berbagai fase, Perang Dingin memasuki fase baru pada awal tahun 1970-an. Baik Amerika Serikat maupun Uni Soviet berusaha memperluas pengaruhnya di wilayah-wilayah Dunia Ketiga, termasuk Asia Tenggara. Khusus bagi Amerika Serikat, upaya memperluas pengaruh di Asia Tenggara melalui pemastian presensinya menjadi semakin imperatif ketika Amerika Serikat kalah dalam Perang Vietnam tahun 1973. Kondisi-kondisi inilah yang kemudian menjadikan Amerika Serikat sebagai salah satu aktor yang berkepentingan dalam perkembangan masalah Timor Portugis. Dalam konteks upayanya mempertahankan presensi di Asia Tenggara, Amerika Serikat berkepentingan untuk menjaga

hubungan diplomatik yang baik dengan Indonesia. Hal ini karena Indonesia, dengan berbagai sumber daya dan potensi yang dimilikinya, menjadi aset penting bagi Amerika Serikat di Asia Tenggara.^{xv}

Meskipun memiliki aspirasi untuk membendung perluasan pengaruh komunis pada skala global, secara spesifik sesungguhnya Amerika Serikat tetap tidak memiliki kepentingan yang berarti terhadap perkembangan masalah Timor Portugis hingga saat-saat terakhir sebelum diambilnya pilihan intervensi militer sebagai kebijakan luar negeri oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah Amerika Serikat melihat masalah Timor Portugis dalam konteks upayanya menjaga hubungan diplomatik dengan Indonesia.^{xvi} Pemerintah Amerika Serikat sedapat mungkin menjaga jarak dari masalah Timor Portugis dan menghindari keterlibatan aktif di dalamnya.^{xvii}

Pada tanggal 6 Desember 1975, Presiden Suharto bersama Menlu Adam Malik bertemu dengan Presiden Ford dan Menlu Henry Kissinger di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Suharto memberikan petunjuk soal kemungkinan intervensi militer yang akan dilakukan Indonesia di Timor Portugis. Kecuali kekhawatiran mengenai kemungkinan penggunaan persenjataan produksi Amerika Serikat, Presiden Ford dan Menlu Kissinger menyatakan bahwa mereka memahami posisi Indonesia dan tidak akan menghalangi keputusan Presiden Suharto. *“We will understand and will not press you on the issue. We understand the problem you have and the intentions you have.”*^{xviii} Meskipun telah memberikan “lampu hijau,” Presiden Ford dan Menteri Luar Negeri Kissinger tetap berusaha meyakinkan bahwa Amerika Serikat tidak akan terlihat terlibat dalam langkah Indonesia untuk melakukan intervensi militer terbuka di Timor Portugis. Untuk itu harus dipastikan bahwa intervensi militer Indonesia dapat dilakukan dalam tempo yang singkat dan dilakukan setelah Presiden Ford beserta rombongan meninggalkan Jakarta.

“... It is important that whatever you do succeeds quickly.”^{xix}

“We understand your problem and the need to move quickly but I am only saying that it would be better if it were done after we returned.”^{xx}

Dua negara lain yang berkepentingan terhadap perkembangan masalah Timor Portugis adalah Portugal dan Australia. Sebagai penguasa di wilayah Timor Portugis, Portugal seharusnya bertanggungjawab terhadap dekolonisasi wilayah tersebut. Akan tetapi, bertolakbelakang dengan kebijakannya terhadap wilayah-wilayah koloninya di Afrika,

pemerintah Portugal cenderung menganggap kemerdekaan Timor Portugis sebagai sesuatu yang tidak realistis. Kebijakan ini memicu reaksi keras dari UDT dan *Fretilin* yang baru terbentuk dan memiliki aspirasi merdeka. Instabilitas di Timor Portugis pun dimulai, dan Indonesia mulai terlibat. Menyadari posisi Indonesia dalam perkembangan masalah Timor Portugis, pemerintah Portugal dan Indonesia, sepanjang periode 1974-1975, juga menjalin komunikasi diplomatik.^{xxi} Kebijakan Portugal terhadap Timor Portugis nampak sekali berkembang seiring perubahan-perubahan internal yang terjadi dalam politik domestik Portugal. Sementara pemerintahan Perdana Menteri Salazar dan Perdana Menteri Caetano lebih resisten terhadap aspirasi dekolonialisasi, pemerintahan Portugal pasca Revolusi Anyelir cenderung lebih akomodatif. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh semakin terbatasnya kemampuan Portugal untuk mengelola pemerintahan di wilayah-wilayah koloninya, termasuk Timor Portugis. Setelah melewati berbagai perkembangan, perwakilan pemerintah Portugal akhirnya meninggalkan Timor Portugis tanggal 26 Agustus 1975, setelah terjadi gerakan bersenjata oleh UDT dan *Fretilin*. Hilangnya kontrol Portugal atas dekolonialisasi di wilayah koloninya ini kemudian membuat Indonesia lebih leluasa sekaligus terdorong untuk melakukan intervensi militer di Timor Portugis.

Kepentingan Australia di Timor Portugis, yang kemudian menjelma ke dalam kebijakan luar negerinya terhadap masalah tersebut, sedikit banyak dipengaruhi oleh posisi geostrategis Australia. Terletak di selatan Asia, Australia memiliki kepentingan untuk sebisa mungkin mencegah terjadinya konflik di sebelah utara wilayahnya. Dalam konteks masalah Timor Portugis, ini berarti berkompromi terhadap kebijakan Indonesia. Oleh karena itu, menjadi masuk akal ketika kebijakan Australia di bawah pemerintahan Perdana Menteri Gough Whitlam menempatkan prioritas tertinggi pada kerjasama dengan Indonesia.^{xxii} Berdasarkan dokumen-dokumen yang dideklasifikasikan pada tahun 2000, pemerintah Australia mengetahui rencana intervensi militer Indonesia di Timor Portugis.^{xxiii} Dalam salah satu dokumen tersebut disebutkan bahwa pemerintah Australia tidak hanya sekedar memberikan dukungan terhadap kebijakan intervensi militer Indonesia tapi juga bahkan mendorong pemerintah Indonesia untuk mengambil kebijakan tersebut.^{xxiv}

Tataran kedua dimana kemungkinan terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan pilihan kebijakan luar negeri Indonesia untuk melakukan intervensi militer di Timor Portugis tanggal 7 Desember 1975 adalah tataran politik domestik. Sebagai titik mula,

analisis sistem pemerintahan Indonesia pada masa Orde Baru harus dilakukan untuk kemudian dilihat bagaimana sistem pemerintahan tersebut memungkinkan kelompok tertentu di pemerintahan memiliki peranan yang besar dalam proses pengambilan kebijakan luar negeri. Peran militer, khususnya TNI-AD sangat besar dalam proses berdirinya, sekaligus sebagai pendukung dan pelindung utama rejim pemerintahan Orde Baru.^{xxv} Peran penting TNI-AD dalam sistem pemerintahan Orde Baru dapat dilihat pada dominasi TNI-AD di struktur pemerintahan serta kegiatan-kegiatan bisnis. Dalam struktur pemerintahan Orde Baru, perwira-perwira TNI-AD banyak mengisi posisi-posisi penting di departemen-departemen pemerintahan.^{xxvi} Selain itu, perwira-perwira TNI-AD juga banyak mengisi posisi pimpinan daerah.^{xxvii} Struktur komando teritorial yang sengaja dibuat paralel dengan struktur birokrasi sipil juga memperkuat kapasitas TNI-AD untuk ikut terlibat mempengaruhi bahkan menentukan kebijakan-kebijakan di tingkat pusat hingga daerah.^{xxviii} Tentu juga tidak kalah penting adalah dominasi TNI-AD di DPR/MPR melalui fraksi ABRI serta Golkar yang bisa dikatakan ketika itu digunakan sebagai mesin politik TNI-AD. Secara konseptual, rezim pemerintahan Orde Baru, yang didirikan, didukung dan dilindungi oleh militer, khususnya TNI-AD, dapat dilihat sebagai sebuah sistem pemerintahan Pretorian.^{xxix}

Di kalangan TNI-AD sebagai Garda Pretoria rejim pemerintahan Orde Baru, terdapat sejumlah kecil perwira yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap pengambilan pilihan kebijakan luar negeri Indonesia untuk melakukan intervensi militer di Timor Portugis tanggal 7 Desember 1975. Perwira-perwira tersebut adalah Yoga Sugama, Ali Moertopo, dan Benny Moerdani. Ketiganya merupakan perwira-perwira dengan latar belakang militer-intelijen yang sudah dekat dengan Suharto semenjak sebelum Suharto menjabat sebagai Presiden. Selain karena faktor kedekatan pribadi, pengaruh Yoga Sugama, Ali Moertopo, dan Benny Moerdani dalam proses pengambilan pilihan kebijakan luar negeri Indonesia untuk melakukan intervensi militer di Timor Portugis tanggal 7 Desember 1975 juga didasarkan pada posisi penting ketiganya dalam struktur komando TNI-AD ketika itu.^{xxx}

Peran Yoga Sugama, Ali Moertopo, dan Benny Moerdani dalam perumusan kebijakan luar negeri Indonesia terhadap masalah Timor Portugis dapat dilihat dalam konteks interaksi politik antara aktor-aktor perumus kebijakan luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru, khususnya dengan Departemen Luar Negeri.^{xxxi} Dalam interaksi ini, TNI-AD yang diwakili oleh Yoga Sugama, Ali Moertopo, dan Benny Moerdani lebih mengedepankan

pendekatan militer-intelijen sebagai kebijakan luar negeri Indonesia terhadap masalah Timor Portugis.^{xxxii} Sedangkan Deplu, melalui Menlu Adam Malik, awalnya lebih mengedepankan pendekatan diplomatik. Meskipun pada awalnya, pada periode pertengahan tahun 1974 hingga awal tahun 1975, Presiden Suharto lebih memilih mengikuti rekomendasi Deplu, akhirnya Presiden Suharto mengikuti juga rekomendasi trio Yoga, Ali, dan Benny untuk mengadopsi pendekatan militer-intelijen. Menlu Adam Malik sendiri akhirnya juga berubah pandangannya. Ketika situasi di Timor Portugis dinilai semakin genting, Adam Malik kemudian menjadi salah satu pihak yang mendukung rekomendasi kebijakan untuk melakukan intervensi militer terbuka. Disebutkan bahwa perubahan sikap antara lain disebabkan karena Adam Malik khawatir akan dipersalahkan jika pendekatan diplomatis yang pada awalnya ia rekomendasikan ternyata berujung pada kegagalan.^{xxxiii}

Individu adalah tataran ketiga yang memunculkan faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan pilihan kebijakan Indonesia untuk melakukan intervensi militer di Timor Portugis tanggal 7 Desember 1975. Individu yang relevan disini adalah Presiden Suharto sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia yang bertanggungjawab terhadap keputusan terakhir dalam memilih kebijakan luar negeri. Pengalaman sejarah personal Presiden Suharto menjadi titik mula analisa. Berdasarkan pengalaman sejarah personal yang dialaminya sejak masa kecil hingga menjadi presiden, terdapat tiga atribut personal Presiden Suharto yang relevan dalam pengambilan pilihan kebijakan luar negeri Indonesia untuk melakukan intervensi militer di Timor Portugis tanggal 7 Desember 1975. Ketiga atribut personal tersebut adalah: (1) penganutan terhadap nilai-nilai kultural dan spiritualitas Jawa, (2) kekhawatiran terhadap interferensi asing, dan (3) antagonisme terhadap komunisme.

Antagonisme Presiden Suharto terhadap komunisme bersumber dari pengalaman sejarah personalnya dimana ia berulang kali berada pada posisi dimana kepentingannya terancam oleh penyebaran pengaruh komunisme. Dalam konteks masalah Timor Portugis, Presiden Suharto memiliki keyakinan bahwa terdapat penyebaran pengaruh komunis di wilayah tersebut yang dapat mengganggu stabilitas dalam negeri Indonesia serta keberlangsungan rejim pemerintahan Orde Baru.^{xxxiv} Sedangkan kekhawatiran Presiden Suharto terhadap intervensi asing bersumber dari pengalaman sejarah personalnya dimana ia berulang kali berada pada posisi dimana kepentingannya terancam oleh intervensi kekuatan-

kekuatan asing. Dalam konteks masalah Timor Portugis, kekhawatiran terhadap intervensi asing ini diwakili oleh adanya bukti-bukti yang menunjukkan keterlibatan negara asing, khususnya Cina, dalam perkembangan masalah Timor Portugis.^{xxxv}

Pengaruh penganutan nilai-nilai kultural dan spiritual Jawa terhadap keputusan Presiden Suharto untuk melakukan intervensi militer di Timor Portugis tanggal 7 Desember 1975 dapat dilihat dari kesesuaian yang terjadi antara perkembangan kebijakan luar negeri Indonesia terhadap masalah Timor Portugis dengan konsepsi Jawa mengenai penangkalan ancaman. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, periode pertengahan 1974 hingga awal 1975 ketika pemerintah Indonesia melakukan pendekatan diplomatik dalam kebijakan luar negerinya terhadap masalah Timor Portugis dapat dilihat sebagai penggunaan metode penyerapan (*absorption*) yang halus. Sedangkan periode awal tahun 1975 hingga akhir 1975, ketika pemerintah Indonesia melakukan pendekatan-pendekatan diplomatik sekaligus militer/intelijen dalam kebijakan luar negerinya terhadap masalah Timor Portugis, dapat dilihat sebagai penggunaan metode pemecahbelahan (*dispersal*) yang mengkombinasikan cara-cara halus dan kasar sekaligus. Terakhir, intervensi militer yang dilakukan tanggal pada akhir tahun 1975 tanggal 7 Desember, ketika penggunaan pendekatan diplomatik dan/atau militer/intelijen tidak lagi memungkinkan, dapat dilihat sebagai penggunaan metode penghancuran (*destruction*) yang kasar.^{xxxvi} Akhirnya, bahwa nilai-nilai kultural Jawa mempengaruhi pilihan kebijakan luar negeri Indonesia untuk melakukan intervensi militer di Timor Portugis tanggal 7 Desember 1975 ditunjukkan oleh fakta bahwa ketika akan mengambil kebijakan intervensi militer terhadap Timor Portugis, Suharto disebutkan terlebih dahulu meminta pertimbangan para leluhur melalui perantara para Romo kepercayaan.^{xxxvii}

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, dapat diidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan pilihan kebijakan luar negeri Indonesia untuk melakukan intervensi militer di Timor Portugis tanggal 7 Desember 1975. Faktor-faktor ini tersebar di tataran lingkungan internasional, politik domestik Orde Baru, serta individu Presiden Suharto. Pada tataran lingkungan internasional faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan pilihan kebijakan luar negeri Indonesia untuk melakukan intervensi militer di

Timor Portugis tanggal 7 Desember 1975 adalah: (1) kebijakan Amerika Serikat yang mendukung pengambilan pilihan kebijakan intervensi militer Indonesia di Timor Portugis dengan melakukan pembiaran terhadap pengambilan pilihan kebijakan tersebut, (2) hilangnya kontrol Portugal atas proses dekolonisasi di Timor Portugis yang ditandai dengan menyingkirnya perwakilan pemerintah Portugal di Timor Portugis ke Pulau Atauro tanggal 26 Agustus 1975, dan (3) kebijakan pemerintah Australia yang memberikan dukungan serta dorongan kepada pemerintah Indonesia untuk mengambil pilihan kebijakan luar negeri untuk melakukan intervensi militer di Timor Portugis. Pada tataran politik domestik Indonesia pada masa Orde Baru faktor yang mempengaruhi pengambilan pilihan kebijakan luar negeri Indonesia untuk melakukan intervensi militer di Timor Portugis tanggal 7 Desember 1975 adalah interaksi politik antara aktor-aktor perumus kebijakan luar negeri yang menempatkan sejumlah perwira TNI-AD, terutama Yoga Sugama, Ali Moertopo, dan Benny Moerdhani, sebagai kelompok dominan. Sedangkan pada tataran individu Presiden Suharto, faktor yang mempengaruhi pengambilan pilihan kebijakan luar negeri Indonesia untuk melakukan intervensi militer di Timor Portugis tanggal 7 Desember 1975 adalah: (1) penganutan Presiden Suharto terhadap nilai-nilai kultural dan spiritual Jawa, (2) antagonisme Presiden Suharto terhadap komunisme, dan (3) kekhawatiran Presiden Suharto terhadap interferensi asing.

Selanjutnya, berdasarkan pemahaman berupa identifikasi faktor-faktor tersebut di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan berupa abstraksi konseptual mengenai pengambilan pilihan kebijakan luar negeri Indonesia untuk melakukan intervensi militer di Timor Portugis tanggal 7 Desember 1975. Pada tataran lingkungan internasional, pengambilan pilihan intervensi militer dipengaruhi oleh kebijakan negara-negara yang berkepentingan terhadap masalah Timor Portugis. Selanjutnya pada tataran politik domestik, pengambilan intervensi militer dipengaruhi oleh interaksi politik antara aktor-aktor perumus kebijakan luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru. Sedangkan pada tataran individu pengambil kebijakan, personalitas Presiden Suharto adalah salah satu faktor yang mempengaruhi pengambilan pilihan kebijakan luar negeri Indonesia untuk melakukan intervensi militer di Timor Portugis tanggal 7 Desember 1975.

Tulisan ini telah memberikan sebuah pemahaman terhadap kasus pengambilan pilihan kebijakan luar negeri Indonesia untuk melakukan intervensi militer di Timor Portugis

tanggal 7 Desember 1975. Pemahaman tersebut adalah berupa identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan pilihan kebijakan luar negeri tersebut, tidak hanya dari satu tataran atau level analisa saja, melainkan tiga tataran atau level analisa sekaligus, yaitu: tataran lingkungan internasional, politik domestik, dan individu. Pemahaman ini kemudian telah menjadi dasar penarikan kesimpulan berupa abstraksi konseptual mengenai pengambilan pilihan kebijakan luar negeri Indonesia untuk melakukan intervensi militer di Timor Portugis tanggal 7 Desember 1975.

Daftar Pustaka

- Anderson, Benedict. "The Idea of Power in Javanese Culture." dalam *Culture and Politics in Indonesia*, diedit oleh Claire Hoft, et al., 1-62. Ithaca: Cornell University Press, 1982.
- Creswell, John. *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches*, Second Edition. Thousand Oaks: SAGE Publications Inc, 2007.
- Crouch, Harold. *Militer dan Politik di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999.
- Embassy Jakarta Telegram 1579 to Secretary State, 6 December 1975 [Text of Ford-Kissinger-Suharto Discussion]*, Secret/Nodis, Gerald R. Ford Library, Kissinger-Scowcroft Temporary Parallel File, Box A3, Country File, Far East-Indonesia, State Department Telegrams 4/1/75-9/22/76. Diakses pada 21 Februari 2013, <http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB62/doc4.pdf>.
- Emmers, Ralf. "Regional Hegemonies and the Exercise of Power in Southeast Asia: A Study of Indonesia and Vietnam." *Asian Survey*, Vol. 45, No. 4, 2005, hal. 645-655.
- Enclosure to Document 3, State Department Briefing Paper, "Indonesia and East Timor," ca. 21 November 1975*. Diakses pada 21 Februari 2013, <http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB174/doc12b.pdf>.
- Head, Mike. "Documents reveal that Australia urged Indonesia to invade East Timor in 1975." *World Socialist Web Site*. Diakses pada 17 Januari 2013. <http://www.wsws.org/en/articles/2000/09/timo-s18.html>.
- Hennink, Monique, Inge Hutter, dan Ajay Bailey. *Qualitative Research Methods*. London: SAGE Publications, 2011.
- Herman, Margaret. "Personality and Foreign Policy Decision Making: A Study of 54 Heads of Government." dalam *Foreign Policy Decision Making: Perceptions, Cognition, and Artificial Intelligence*, diedit oleh S. Chan dan D. Sylvan, 53-80. New York: Praeger, 1984.
- Hoadley, J. Stephen. "Indonesia's Annexation of East Timor: Political, Administrative, and Developmental Initiatives." *Southeast Asian Affairs*, 1977, hal.133-142.

- Holsti, K. J. *International Politics: A Framework for Analysis 5th Edition*. New Jersey: Prentice-Hall, 1988.
- Jenkins, David. *Soeharto & Barisan Jenderal Orba: Rezim Militer Indonesia 1975-1983*. Depok: Komunitas Bambu, 2010.
- Jervis, Robert. *Perception and Misperception in International Politics*. Princeton: Princeton University Press, 1976.
- Jervis, Robert. "Hypotheses on Misperception." *World Politics*, Vol. 20, 1968, hal. 454-479.
- Kaplan, Morton. "Balance of Power, Bipolarity and Other Models of International System." *The American Political Science Review*, Vol. 51, No. 3, 1957, hal. 684-695.
- Keohane, Robert dan Joseph Nye. *Power and Interdependence: World Politics in Transition*. Boston: Little, Brown, 1977.
- Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi (CAVR) di Timor Leste. *Chega! Laporan Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi (CAVR) di Timor Leste Volume I*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2010.
- Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi (CAVR) di Timor Leste. *Chega! Laporan Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi (CAVR) di Timor Leste Volume II: Pelanggaran-Bagian I*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2010.
- Lawless, Robert. "The Indonesian Takeover of East Timor." *Asian Survey*, Vol. 16, No. 10, 1976, hal. 948-964.
- Leifer, Michael. "Indonesia and the Incorporation of East Timor." *The World Today*, Vol. 32, No. 9, 1976, hal. 347-354.
- Leifer, Michael. *Indonesia's Foreign Policy*. London: George Allen & Unwin, 1983.
- Lobell, Steven E., Norrin M. Ripsman, Jeffrey W. Taliaferro, editor. *Neoclassical Realism, the State, and Foreign Policy*. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
- McDonald, Hamish. *Suharto's Indonesia*. Melbourne: Fontana/Collins, 1980.
- Mearsheimer, John. "Back to the Future Instability in Europe after the Cold War." *International Security*, Vol. 15, No.1, 1990, hal. 5-56.
- Mearsheimer, John. *The Tragedy of Great Power Politics*. New York: W. W. Norton, 2001.
- Memorandum of Conversation between President Ford and Suharto, 5 July 1975, 12:40 p.m.-2:00 p.m.*, Gerald R. Ford Library, National Security Adviser Memoranda of Conversations, Box 13, July 5, 1965 - Ford, Kissinger, Indonesian President Suharto. Diakses pada 21 Februari 2013, <http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB62/doc1.pdf>.
- Memorandum for President Ford from Henry A. Kissinger, "Your Visit to Indonesia," ca. 21 November 1975*. Diakses pada 21 Februari 2013, <http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB174/doc12a.pdf>.
- Moertono, Soemarsaid. *State and Statecraft in Old Java*. Ithaca: Cornell University, 1968.
- National Security Council Memo from W. R. Smyser to Henry Kissinger, "Policy Regarding Possible Indonesian Military Action against Portuguese Timor," March 4, 1975*, Gerald Ford Library. Diakses pada 21 Februari 2013, <http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB174/963.pdf>.
- Painter, David. *The Cold War: An international history*. London: Routledge, 1999.
- Pearson, Frederic dan Robert Baumann. "Foreign military intervention and changes in United States business activity." *Journal of Political and Military Sociology*, Vol. 5, 1977, hal. 79-97.

- Perlmutter, Amos. "The Praetorian State and the Praetorian Army: Toward a Taxonomy of Civil-Military Relations in Developing Polities." *Comparative Politics*, Vol. 1, No. 3, 1969, hal. 382-404.
- Rose, Gideon. "Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy." *World Politics*, Vol. 51, No. 1, 1998, hal. 144-172.
- Rosenau, James. *The Study of Global Interdependence: Essays on the Transnationalisation of World Affairs*. New York: Nichols, 1980.
- Rosenau, James. "The Functioning of International Systems." *Background*, Vol. 7, No. 3, 1963, hal. 111-117.
- Said, Salim. *Tumbuh dan Kembangnya Dwifungsi: Perkembangan Pemikiran Politik Militer Indonesia 1958-2002*. Jakarta: Aksara Karunia, 2002.
- Snyder, Glenn. "The Security Dilemma in Alliance Politics." *World Politics*, Vol. 36, No. 4, 1984, hal. 461-495.
- "Soedjono dan Orde Dhawuh." *Edisi Khusus Majalah Tempo*, 10 Februari 2008, 103-109.
- Suryadinata, Leo. *Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Soeharto*. Jakarta: LP3ES, 1998.
- Telegram 3749 from State Department to USDEL Secretary of State, December 4, 1975*, Kissinger-Scowcroft Temporary Parallel File, Box A3, Country File, Far East-Indonesia. Diakses pada 21 Februari 2013, <http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB174/1001.pdf>.
- Telegram 10244 from U.S. Embassy in Jakarta to State Department, "Indonesia and Portuguese Timor," August 21, 1975*, Gerald Ford Library. Diakses pada 21 Februari 2013, <http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB174/989.pdf>.
- The Guardian*. "Australia let Indonesia invade East Timor in 1975." 13 September 2000. Diakses pada 13 Januari 2013. <http://m.guardian.co.uk/world/2000/sep/13/indonesia.eastimor>.
- Walt, Stephen. "Alliance Formation and the Balance of World Power." *International Security*. Vol. 9, No. 4, 1985, hal. 3-43.
- Walt, Stephen. *The Origins of Alliances*. Ithaca: Cornell University Press, 1987.
- Waltz, Kenneth. *Man, the State and War: A Theoretical Analysis*. New York: Columbia University Press, 1959.
- Waltz, Kenneth. *Theory of International Politics*. New York: McGraw-Hill, 1979.
- Waltz, Kenneth. "The Stability of a Bipolar World." *Daedalus*, Vol. 93, No. 3, 1964, hal. 881-909.
- Weatherbee, Donald. "Indonesianization of East Timor." *Contemporary Southeast Asia*, Vol. 13, No. 1, 1981, hal. 1-23.

Catatan Belakang

ⁱ Operasi semacam ini, dalam skala yang jauh lebih besar, pernah direncanakan dalam bentuk Operasi Jayawijaya sebagai bagian dari kampanye merebut Irian Barat yang diduduki Belanda pada tahun 1961-1962. Akan tetapi Operasi Jayawijaya urung dijalankan karena Indonesia dan Belanda akhirnya sepakat untuk menyelesaikan persoalan Irian Barat melalui jalur diplomasi. Hanya sejumlah operasi infiltrasi saja yang sudah dijalankan ketika itu.

ⁱⁱ Setelah Konfrontasi menentang pendirian Federasi Malaysia pada paruh pertama dekade 1960an, Indonesia menunjukkan perubahan sikap internasional. Setelah kejatuhan rezim Orde Lama dibawah kekuasaan

Presiden Sukarno, rezim Orde Baru berdiri dibawah kekuasaan Presiden Suharto. Meskipun secara prinsipil tidak terdapat perubahan dalam visi internasional dan regional, Indonesia pada masa Orde Baru relatif lebih *benevolent* kebijakan luar negerinya. Hal ini ditunjukkan dengan penghentian politik Konfrontasi dan normalisasi hubungan dengan Malaysia yang berujung pada pembentukan Association of Southeast Asia Nations (ASEAN) pada tahun 1967. Kebijakan luar negeri Indonesia yang *benevolent* ini dipengaruhi oleh keinginannya untuk meyakinkan negara-negara tetangga di kawasan bahwa aspirasi hegemonik Indonesia tidak lagi akan diwujudkan melalui kebijakan-kebijakan luar negeri yang koersif sehingga kepemimpinan Indonesia di kawasan dapat lebih diterima. Kebijakan luar negeri yang *benevolent* ini terus berlanjut hingga pada pertengahan tahun 1970-an Indonesia mengambil kebijakan luar negeri yang cenderung agresif terhadap Timor Portugis. Menurut Ralf Emmers, kebijakan luar negeri Indonesia dipengaruhi oleh dua tipe emosi yaitu rasa kerawanan akibat kelemahan-kelemahan domestik dan rasa berhak atas posisi pemimpin di kawasan. Dipengaruhi oleh dua tipe emosi ini, kebijakan luar negeri Indonesia mengarahkannya untuk menjadi *regional hegemony* di kawasan Asia Tenggara Maritim. Visi regional ini tidak berubah meskipun bagaimana visi tersebut berusaha diwujudkan berubah dari yang sebelumnya *coercive* pada masa Orde Lama menjadi *benevolent* pada masa Orde Baru. Lihat Ralf Emmers, "Regional Hegemonies and the Exercise of Power in Southeast Asia: A Study of Indonesia and Vietnam," *Asian Survey* 45, no. 4 (2005): 645-655.

ⁱⁱⁱ Operasi semacam ini, dalam skala yang jauh lebih besar, pernah direncanakan dalam bentuk Operasi Jayawijaya sebagai bagian dari kampanye merebut Irian Barat yang diduduki Belanda pada tahun 1961-1962. Akan tetapi Operasi Jayawijaya urung dijalankan karena Indonesia dan Belanda akhirnya sepakat untuk menyelesaikan persoalan Irian Barat melalui jalur diplomasi. Hanya sejumlah operasi infiltrasi saja yang sudah dijalankan ketika itu.

^{iv} Beberapa karya ilmiah dipublikasikan dekat setelah kasus intervensi militer Indonesia di Timor Portugis. Akan tetapi, publikasi-publikasi inipun, salah satunya disebabkan oleh ketidakterediaan data dan informasi yang mencukupi, lebih bersifat deskriptif-naratif dan bukan sebagai sebuah karya akademis yang sistematis. Karya-karya akademis tersebut juga cenderung mengabaikan sejumlah fakta yang berada di luar kerangka pemikiran yang digunakan oleh penulisnya masing-masing. Lihat diantaranya Michael Leifer, "Indonesia and the Incorporation of East Timor," *The World Today* 32, no. 9 (1976): 347-354; Robert Lawless, "The Indonesian Takeover of East Timor," *Asian Survey* 16, no. 10 (1976): 948-964; . Stephen Hoadley, "Indonesia's Annexation of East Timor: Political, Administrative, and Developmental Initiatives," *Southeast Asian Affairs* (1977): 133-142; Donald E. Weatherbee, "Indonesianization of East Timor," *Contemporary Southeast Asia* 13, no. 1 (1981): 1-23.

^v Pendekatan level analisa ini diadopsi dari pemikiran Kenneth Waltz tentang tiga kategori atau level analisa penyebab perang, yang disebutnya sebagai "*images*"; perang dapat dijelaskan oleh natur individu pemimpin negara (*first image*), kondisi domestik negara (*second image*), dan sistem internasional (*third image*). Lihat Kenneth Waltz, *Man, the State and War: A Theoretical Analysis* (New York: Columbia University Press, 1959); Kenneth Waltz, *Theory of International Politics* (New York: McGraw-Hill, 1979). Teori-teori yang digunakan pada kajian kebijakan luar negeri yang berada pada level sistemik menjelaskan kebijakan luar negeri dengan merujuk pada kondisi-kondisi pada sistem internasional yang memaksa atau menekan negara untuk melakukan tindakan tertentu, dalam hal ini mengambil kebijakan luar negeri tertentu. Lihat diantaranya Waltz, *Man, the State and War*; Waltz, *Theory of International Politics*; John Mearsheimer, "Back to the Future Instability in Europe after the Cold War," *International Security* 15, no. 1, (1990): 5-56; John Mearsheimer, *The Tragedy of Great Power Politics* (New York: W. W. Norton, 2001). Pemahaman dan penjelasan atas kebijakan luar negeri dapat pula dilakukan dengan menggunakan teori-teori yang berada pada level negara-bangsa dan individu. Teori-teori ini melihat hubungan antara aparatus negara (*state apparatus*) dan masyarakat (*surrounding society*) sebagai penjelas terhadap kebijakan luar negeri. Lihat diantaranya kelompok teori *neoclassical realism* di Gideon Rose, "Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy," *World Politics* 51, no. 1 (1998): 144-172; Steven E. Lobell, Norrin M. Ripsman, Jeffrey W. Taliaferro, ed., *Neoclassical Realism, the State, and Foreign Policy* (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), serta kelompok teori liberalisme di James Rosenau, *The Study of Global Interdependence: Essays on the Transnationalisation of World Affairs* (New York: Nichols, 1980); Robert Keohane dan Joseph Nye, *Power and Interdependence: World Politics in Transition* (Boston: Little, Brown, 1977). Untuk pemahaman dan penjelasan atas kebijakan luar negeri pada level individu lihat diantaranya di Robert Jervis, "Hypotheses on Misperception," *World Politic* 20, (1968): 454-479; Robert Jervis, *Perception and Misperception in International Politics* (Princeton: Princeton University Press, 1976); Margaret Herman, "Personality and Foreign Policy Decision Making: A Study of 54 Heads of Government," dalam *Foreign Policy Decision*

Making: Perceptions, Cognition and Artificial Intelligence, diedit oleh S. Chan dan D. Sylvan (New York: Praeger, 1984).

^{vi} Frederic Pearson dan Robert Baumann, *International Military Intervention, 1946–1988* (Ann Arbor: University of Michigan, 1993), 1, dikutip dalam Jeffrey Pickering dan Emizet F. Kisangani, “The International Military Intervention Dataset: An Updated Resource for Conflict Scholars,” *Journal of Peace Research* 46, no. 4, (2009): 593.

^{vii} K. J. Holsti, *International Politics: A Framework for Analysis*, edisi ke-5 (New Jersey: Prentice-Hall, 1988), 92.

^{viii} Penjelasan mengenai pendekatan kualitatif dalam penelitian dapat dilihat diantaranya di Monique Hennink, Inge Hutter, dan Ajay Bailey, *Qualitative Research Methods* (London: SAGE Publications, 2011); John Creswell, *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches*, edisi ke-2 (Thousand Oaks: SAGE Publications Inc., 2007).

^{ix} Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi (CAVR) di Timor Leste, *Chega! Laporan Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi (CAVR) di Timor Leste Volume I* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2010), 201.

^x *Ibid.*, 204

^{xi} Penjelasan konseptual mengenai sistem internasional dapat ditemui diantaranya dalam Morton A. Kaplan, “Balance of Power, Bipolarity and Other Models of International System,” *The American Political Science Review*, 51, no. 3 (1957): 684; James Rosenau, “The Functioning of International Systems,” *Background* 7, no. 3 (1963): 111-117; Waltz, *Theory of International Politics*.

^{xii} Sebelum dan selama Perang Dunia II terjadi terdapat setidaknya enam kekuatan besar (*great powers*) dalam sistem internasional, yaitu Kerajaan Inggris, Perancis, Jerman, Uni Soviet, Jepang dan AS. Setelah Perang Dunia II berakhir konstelasi *great powers* ini berubah. Jerman dan Jepang menjadi pihak yang kalah dalam Perang Dunia II dan kelangsungannya ditentukan oleh pihak Sekutu sebagai pemenang perang. Sementara itu Inggris dan Perancis, meskipun berada di pihak yang memenangkan perang, menjadi terlalu lemah untuk meneruskan tanggungjawab yang diembannya sebagai *great powers* sebelum Perang Dunia II. Lihat David S. Painter, *The Cold War: An International History*, (London: Routledge, 1999), 4.

^{xiii} Mobilisasi sumber daya yang dilakukan AS selama Perang Dunia II memberi keuntungan baginya; industri dalam negeri membesar, pasukannya berada di titik-titik strategis di daratan Eropa dan Asia, seluruh musuhnya selama perang terkalahkan sedangkan aliansinya sesama pemenang perang menjadi terlalu lemah. AS juga menjadi satu-satunya *great power* yang terlibat dalam Perang Dunia II yang teritorinya –kecuali Hawaii– yang tidak tersentuh oleh serang musuh selama perang terjadi. Mobilisasi dan produksi selama Perang Dunia II justru membawa AS keluar dari depresi ekonomi yang dialaminya sebelum Perang Dunia II terjadi. Pada tahun 1945, AS menguasai sekitar separuh dari kapasitas manufaktur dunia, sebagian besar surplus pangan dunia, dan sebagian besar pula cadangan finansial dunia. AS juga ketika itu memimpin dalam pengembangan teknologi, salah satunya dalam aspek penggunaan teknologi dalam perang. AS juga menikmati suplai energi dari produksi domestik dalam jumlah yang lebih dari cukup, ditambah dengan akses terhadap cadangan minyak di kawasan-kawasan lain seperti Amerika Latin dan Timur Tengah. Lihat Painter, *The Cold War*, 5-6. Begitu juga dengan Uni Soviet, yang setelah berakhirnya Perang Dunia II mendapati pasukannya berada jauh diluar teritorinya, seperti di Eropa Timur dan Korea Utara. Gelar pasukan ini terus dipertahankan Uni Soviet selama Perang Dingin sambil terus memperluas pengaruhnya.

^{xiv} Mengenai stabilitas sistem internasional yang bipolar lihat diantaranya Kenneth Waltz, “The Stability of a Bipolar World,” *Daedalus* 93, no. 3 (1964): 881-909; Mearsheimer, *The Tragedy*; Mearsheimer, “Back to the Future.” Mengenai pola aliansi dalam sistem internasional yang bipolar lihat Glenn Snyder, “The Security Dilemma in Alliance Politics,” *World Politics* 36, no. 4 (1984): 461-495; Waltz, “The Stability of a Bipolar World”; Stephen M. Walt, “Alliance Formation and the Balance of World Power,” *International Security* 9, no. 4 (1985): 3-43; Stephen M. Walt, *The Origins of Alliances* (Ithaca: Cornell University Press, 1987). Mengenai relevansi ideologi dalam pemilihan aliansi lihat Walt, “Alliance Formation”; Walt, *The Origin of Alliances*.

^{xv} *Memorandum for President Ford from Henry A. Kissinger, “Your Visit to Indonesia,” ca. 21 November 1975*, diakses pada 21 Februari 2013, <http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB174/doc12a.pdf>.

^{xvi} Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi (CAVR) di Timor Leste, *Chega! Laporan Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi (CAVR) di Timor Leste Volume II: Pelanggaran-Bagian I* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2010), 717.

^{xvii} *Enclosure to Document 3, State Department Briefing Paper, “Indonesia and East Timor,” ca. 21 November 1975*, diakses pada 21 Februari 2013,

<http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB174/doc12b.pdf>; *Telegram 3749 from State Department to USDEL Secretary of State, December 4, 1975*, Kissinger-Scowcroft Temporary Parallel File, Box A3, Country File, Far East-Indonesia, diakses pada 21 Februari 2013, <http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB174/1001.pdf>

^{xviii} *Ibid.*

^{xix} *Embassy Jakarta Telegram 1579 to Secretary State, 6 December 1975 [Text of Ford-Kissinger-Suharto Discussion]*, *Secret/Nodis*, Gerald R. Ford Library, Kissinger-Scowcroft Temporary Parallel File, Box A3, Country File, Far East-Indonesia, State Department Telegrams 4/1/75-9/22/76, diakses pada 21 Februari 2013, <http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB62/doc4.pdf>

^{xix} *Ibid.*

^{xx} *Ibid.*

^{xxi} Delegasi Portugal dan Indonesia bertemu di Lisabon pada pertengahan bulan Oktober 1974 dimana, menurut pengakuan delegasi Indonesia, pemerintah Portugal telah menyatakan dukungannya terhadap opsi integrasi dengan Indonesia. Pertemuan resmi kedua berlangsung tanggal 9 Maret 1975 di Jakarta. Dalam pertemuan itu, sementara pihak Indonesia mulai mengambil sikap tegas dengan menolak opsi pembentukan pemerintahan transisi, pemerintah Portugal menegaskan prinsip perlunya mendengar aspirasi rakyat Timor Portugis sendiri mengenai masa depan wilayah koloni tersebut. Meskipun belum melepaskan sepenuhnya tanggungjawabnya terhadap Timor Portugis, pemerintah Portugal dalam pertemuan di London tampaknya telah memperkuat dukungannya bagi Indonesia untuk mengambil peran lebih aktif di Timor Portugis, salah satunya dengan mengatakan bahwa Indonesia berhak untuk memberi dukungan aktif bagi *Apodeti*. Dengan demikian, Portugal memberi Indonesia status yang melampaui status “pengamat berkepentingan.” Selanjutnya pada tanggal 26-28 Juni 1975 di Makau diadakan pertemuan antara Menteri Koordinator Antar-Wilayah Antonio de Almeida Santos dengan perwakilan UDT, *Apodeti* dan pengamat diplomatik Indonesia. *Fretilin* memboikot pertemuan ini karena curiga bahwa pertemuan tersebut merupakan bagian dari strategi Portugal untuk menyerahkan Timor Portugis kepada Indonesia. Pertemuan terakhir antara pemerintah Indonesia dan Portugal, sebelum intervensi militer Indonesia, terjadi di Roma tanggal 1-2 November 1975, namun hasilnya tidak begitu berpengaruh.

^{xxii} Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi, *Chega! Laporan Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi (CAVR) di Timor Leste Volume II*, 683.

^{xxiii} The Guardian, “Australia let Indonesia invade East Timor in 1975,” 13 September 2000, diakses pada 13 Januari 2013, diakses pada 21 Februari 2013, <http://m.guardian.co.uk/world/2000/sep/13/indonesia.eastimor>. Penulis tidak berhasil mendapat kopian dokumen tersebut.

^{xxiv} Mike Head, “Documents reveal that Australia urged Indonesia to invade East Timor in 1975,” World Socialist Web Site, 18 September 2000, diakses pada 17 Januari 2013, diakses pada 21 Februari 2013, <http://www.wsws.org/en/articles/2000/09/timo-s18.html>

^{xxv} Pada Seminar Angkatan Darat II di Bandung, bulan Agustus 1966 bahkan dinyatakan secara terbuka bahwa Orde Baru adalah sebuah rejim pemerintahan yang didirikan oleh TNI, khususnya TNI Angkatan Darat. Lihat Salim Said, *Tumbuh dan Kembangnya Dwifungsi: Perkembangan Pemikiran Politik Militer Indonesia 1958-2002* (Jakarta: Aksara Karunia, 2002), 4.

^{xxvi} Dalam susunan Kabinet Ampera yang dibentuk oleh Suharto pada bulan Juli 1966, berdasarkan Ketetapan MPRS No. XIII/MPRS/1966, 6 menteri diambil dari Angkatan Darat dan 6 lagi termasuk panglima-panglima dari tiap-tiap angkatan lainnya dari militer. Departemen-departemen penting seperti Departemen Dalam Negeri, Departemen Pertahanan dan Departemen Perdagangan dipimpin oleh perwira-perwira Angkatan Darat. Dari 20 departemen yang berurusan dengan urusan sipil pada tahun 1966 para perwira Angkatan Darat menduduki posisi sekretaris jenderal di sepuluh departemen dan seorang perwira Angkatan Laut pada satu departemen. Begitu juga dengan posisi direktur jenderal. Di antara 64 direktur jenderal yang diangkat pada tahun 1966, 15 adalah perwira Angkatan Darat dan delapan orang dari ketiga angkatan lainnya. Ketika itu hanya ada dua departemen yang menterinya bukan jenderal Angkatan Darat, sekretaris jenderal atau direktur jendralnya bukan perwira Angkatan Darat. Pada susunan kabinet-kabinet selanjutnya selama masa Orde Baru, kalangan teknokrat sipil mendominasi. Akan tetapi, harus diingat bahwa kabinet-kabinet Orde Baru, mirip dengan kabinet yang dipimpin Sukarno, bukanlah suatu badan pembuat keputusan. Kabinet-kabinet ini mengadakan pertemuan terutama untuk mendengarkan garis-garis besar dari presiden dan melapor kepadanya. Dengan kata lain kalangan teknokrat sipil ini sesungguhnya tidak memiliki kekuatan politik sendiri sehingga mereka harus menyesuaikan diri untuk membuat dan melaksanakan kebijakan-kebijakan di dalam kerangka yang disusun oleh Suharto dan para perwira Angkatan Darat kepercayaannya. Lihat Harold

Crouch, *Militer dan Politik di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999); David Jenkins, *Soeharto & Barisan Jenderal Orba: Rezim Militer Indonesia 1975-1983* (Depok: Komunitas Bambu, 2010).

^{xxvii} Pada tahun 1966, 12 di antara 24 gubernur provinsi adalah perwira-perwira Angkatan Darat, termasuk mereka yang berada di provinsi-provinsi penting seperti Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur. Pada tahun 1968 jumlah ini meningkat menjadi 16. Setelah Pemilu 1971, hanya tersisa empat kursi gubernur yang dijabat oleh pejabat sipil dari total 26 provinsi. Antara tahun 1965 hingga 1968 jumlah walikota dan bupati sipil turun dari 15 menjadi hanya 3 di Jawa Barat, 38 menjadi 19 di Jawa Tengah dan Yogyakarta, 33 menjadi 20 di Jawa Timur. Pada tahun 1969 jumlah walikota dan bupati militer naik menjadi 147 dari 271 jumlah jabatan tersebut di seluruh Indonesia. Setelah Pemilu 1971, perbandingannya bahkan mencapai dua pertiga. Lihat Crouch, *Militer dan Politik*.

^{xxviii} Struktur komando teritorial ini meliputi Komando Daerah Militer (Kodam), Komando Resor Militer (Korem), Komando Distrik Militer (Kodim), Komando Rayon Militer (Koramil) hingga Bintara Pembina Desa (Babinsa).

^{xxix} Istilah “pretorian” sendiri diadopsi dari nama yang melekat pada sekelompok pasukan pengawal Kaisar Roma dari sejak abad ke-3 SM hingga abad ke-4 M. Pasukan penjaga ini (*Roman Praetorian Guard*) bertugas mempertahankan legitimasi Republik (kemudian Kekaisaran) Roma dengan melindungi Senat dari ancaman pemberontak. Di era modern, istilah “negara pretoria” digunakan untuk merujuk pada negara dimana kelompok militer berkecenderungan untuk mengintervensi dan memiliki potensi untuk mendominasi sistem politik negara bersangkutan. Pada negara pretoria, kepemimpinan politik dikuasai oleh kelompok militer, kelompok-kelompok yang bersimpati pada militer, atau sekurang-kurangnya tidak menunjukkan sikap antagonistik terhadap militer. Dengan kata lain, pada negara pretoria, militer memainkan peran dominan dalam struktur politik. Lihat Amos Perlmutter, “The Praetorian State and the Praetorian Army: Toward a Taxonomy of Civil-Military Relations in Developing Polities,” *Comparative Politics* 1, no. 3 (1969), 382-404.

^{xxx} Pada tahun 1975, Yoga Sugama baru saja dipanggil pulang dari penugasannya di New York sebagai Duta Besar/Wakil Kepala Pemerintahan Tetap RI di PBB untuk kembali menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Intelijen (BAKIN). Ali Moertopo ketika itu menjabat sebagai Wakil Kepala BAKIN sekaligus anggota Staf Pribadi (SPRI) Presiden Suharto. Sedangkan Benny Moerdani ketika itu menjabat sebagai Asintel Hankam, Asintel Kopkamtib dan Kapusintelstrat sekaligus. Posisi yang terakhir memberi kekuasaan kepada Benny Moerdani untuk menggerakkan 5.000 anggota Komando Pasukan Sandi Yudha (Kopasandha), sebuah satuan pasukan khusus di TNI-AD yang nantinya memang menjadi salah satu bagian penting dalam pasukan yang diterjunkan di Timor Portugis.

^{xxxi} Selain militer dan Deplu, sebenarnya terdapat aktor-aktor perumus kebijakan luar negeri Indonesia yang lain, yakni DPR-RI dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Akan tetapi, pada kenyataannya peran keduanya minim dalam perumusan kebijakan luar negeri Indonesia terhadap masalah Timor Portugis diantaranya karena adanya pembagian kerja yang menempatkan Bappenas lebih sebagai perumus kebijakan ekonomi serta komposisi anggota DPR-RI yang dikuasai oleh Golkar dan militer. Lihat Michael Leifer, *Indonesia's Foreign Policy* (London: George Allen & Unwin, 1983); Leo Suryadinata, *Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Soeharto* (Jakarta: LP3ES, 1998).

^{xxxii} Selain dalam perumusan kebijakan, Yoga Sugama, Ali Moertopo dan Benny Moerdani juga terlibat langsung dalam pengimplementasian kebijakan luar negeri Indonesia terhadap masalah Timor Portugis. Ali Moertopo misalnya, menjadi bagian dari delegasi Indonesia untuk berunding dengan Portugal pada akhir tahun 1974 dan awal 1975. Demikian juga dengan Yoga Sugama yang diketahui menjalin komunikasi dengan pejabat Departemen Luar Negeri AS untuk mencoba mencari informasi terkait kemungkinan respon pemerintah AS jika Indonesia melakukan intervensi militer di Timor Portugis. Sedangkan Benny Moerdani menjadi aktor terpenting dalam Operasi Flamboyan, sebuah operasi intelijen yang dilakukan oleh BAKIN, dengan menyusupkan pasukan Kopasandha, untuk menggalang dukungan di Timor Portugis yang dilakukan sejak Mei 1975. Rekomendasi Garda Pretoria Suharto untuk melakukan kebijakan luar negeri dengan pendekatan militer-intelijen itu sendiri dipengaruhi oleh konsepsi pertahanan dan keamanan serta persepsi ancaman yang dianut oleh kalangan militer pada masa Orde Baru.

^{xxxiii} Hamish McDonald, *Suharto's Indonesia* (Melbourne: Fontana/Collins, 1980), 207.

^{xxxiv} Lihat *Memorandum of Conversation between President Ford and Suharto, 5 July 1975, 12:40 p.m.-2:00 p.m.*, Gerald R. Ford Library, National Security Adviser Memoranda of Conversations, Box 13, July 5, 1965 - Ford, Kissinger, Indonesian President Suharto, diakses pada 21 Februari 2013, <http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB62/doc1.pdf>; *Embassy Jakarta Telegram 1579 to Secretary State, 6 December 1975 [Text of Ford-Kissinger-Suharto Discussion]*, *Secret/Nodis*, Gerald R. Ford

Library, Kissinger-Scowcroft Temporary Parallel File, Box A3, Country File, Far East-Indonesia, State Department Telegrams 4/1/75-9/22/76, diakses pada 21 Februari 2013, <http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB62/doc4.pdf>.

^{xxxv} Pada medio 1974-1975, Presiden Suharto dan para penasihatnya berulang kali menyatakan kekhawatirannya kalau Timor Portugis yang merdeka akan condong ke “kiri” serta lemah secara ekonomi sehingga akan mencari dukungan dari RRC. Lihat Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi (CAVR) di Timor Leste, *Chega! Laporan Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi (CAVR) di Timor Leste Volume II*, 706-708; *Telegram 10244 from U.S. Embassy in Jakarta to State Department, “Indonesia and Portuguese Timor,” August 21, 1975*, Gerald Ford Library, diakses pada 21 Februari 2013, <http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB174/989.pdf>; *National Security Council Memo from W. R. Smyser to Henry Kissinger, “Policy Regarding Possible Indonesian Military Action against Portuguese Timor,” March 4, 1975*, Gerald Ford Library, diakses pada 21 Februari 2013, <http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB174/963.pdf>.

^{xxxvi} Konsepsi Jawa mengenai metode penangkalan ancaman ini sendiri berasal dari konsepsi Jawa mengenai *power*. Dalam konsepsi Jawa *power* dilihat dengan cara yang berbeda dengan apa yang kemudian kita pahami sebagai konsepsi *power* ala Barat. Pertama, alih-alih abstrak, *power* dalam tradisi Jawa dilihat sebagai sesuatu yang konkrit. *Power* bukanlah didasarkan atas pola hubungan tertentu sebagaimana dipahami melalui konsep modern. Sebagaimana juga sudah disinggung di atas, seseorang mendapat *power* melalui *wahyu*. Kedua, alih-alih heterogen, *power* dalam konsepsi Jawa bersifat homogen. Ketiga, alih-alih tidak memiliki batasan, akumulasi *power* di dunia, oleh tradisi Jawa, dianggap selalu konstan; jika seseorang mendapat *power*, maka ada orang lain yang kehilangan *power*. Keempat, alih-alih secara moral ambigu, *power* dalam konsepsi tidak mempersoalkan masalah legitimasi. Karena *power* berasal dari sumber yang homogen, *power* itu sendiri dianggap tidak relevan dengan permasalahan “baik” atau “buruk.” Lihat Benedict Anderson, “The Idea of Power in Javanese Culture,” dalam *Culture and Politics in Indonesia*, diedit oleh Claire Hoft, et al. (Ithaca: Cornell University Press, 1982): 5-8. Konsepsi Jawa juga mempengaruhi pandangan mengenai hal-hal yang berbau kenegaraan, kedaulatan dan hubungan antar-negara. Konsepsi negara dan kedaulatan dalam tradisi Jawa bersifat sentripetal. Artinya, sebuah negara dirujuk berdasarkan pusat kekuasaannya. Bukan suatu kebetulan ketika kita menemukan kerajaan-kerajaan Jawa kuno biasanya dinamai dengan nama ibukota atau lokasi pusat kekuasaannya, misalnya Kerajaan Majapahit, Singasari, Kediri dan sebagainya. Dari pusatnya ini, *power* negara menyebar. Pada jarak tertentu pengaruh *power* negara kemudian mulai memudar, bercampur dengan pengaruh *power* negara lain untuk kemudian menghilang sepenuhnya ketika sudah memasuki wilayah yang semakin dekat dengan pusat kekuasaan negara lain. Dengan kata lain, negara dan dalam konsepsi Jawa dipahami berdasarkan pusatnya, bukan perimeternya. Lihat Anderson, “The Idea of Power,” 29. Konsepsi sentripetalitas negara Jawa kuno ini membawa dampak terhadap pemikiran politik. Karena kekuasaan sebuah negara menyebar dari pusat, dan perlahan menghilang relatif terhadap jarak, maka kekuasaan lebih diarahkan untuk mengendalikan populasi, bukan teritori. Pemerintahan di tingkat pusat kemudian memiliki kebutuhan untuk memastikan bahwa populasi yang berada relatif jauh dari pusat kekuasaan tetap merasakan pengaruh dan kendali dari kekuasaan tersebut. Salah satu cara untuk mencapai hal tersebut, sebagaimana dipahami oleh Presiden Suharto, adalah dengan mewujudkan integritas sosial dan kewilayahan. Lihat Anderson, “The Idea of Power,” 30. Konsepsi Jawa mengenai *power* yang sifatnya sentripetal kemudian juga mempengaruhi pandangan terhadap pola hubungan antar-negara. Dalam konsepsi Jawa dikenal konsep “mandala.” “... *mandala (circle, namely of influence, interest or ambitions) can be described as complex of geopolitical relations, relating boundaries and to contact with foreign countries. The doctrine emphasized the cult of expansion, a necessary spur to the struggle for existence, self-assertion and world domination, and the dynamic factor calculated to disturb the equilibrium of inter-state relations. A state’s belligerence is in the first place directed towards its closest neighbour(s), thus making necessary the friendship of the state next to the foe, which, because of its proximity, is also a natural enemy of the foe. But if the mutual foe should be conquered, the two allies would become close neighbours, which would create a new enmity. So this circle of alignment and alienation would steadily expand until a universal peace is reached by the establishment of a world-state with a sole and supreme leader (chakravartin).*” Meskipun pada dasarnya nilai-nilai Jawa mengedepankan kerukunan, harmoni dan penghindaran konflik, pada tataran hubungan antar-negara tetap diakui bahwa naturnya bersifat konfliktual; senantiasa ada potensi ancaman dari negara lain. Lihat Soemarsaid Moertono, *State and Statecraft in Old Java*, (Ithaca: Cornell University, 1968), 71, dikutip dalam Anderson, “The Idea of Power,” 31-31.

^{xxxvii} “Soedjono dan Orde Dhawuh,” *Edisi Khusus Majalah Tempo*, 10 Februari 2008. Sejak sebelum memegang tampuk kekuasaan Orde Baru, Presiden Suharto melanjutkan keyakinannya terhadap nilai-nilai

kultural Jawa dengan rutin berdiskusi dan meminta pendapat sejumlah ahli spritual Jawa. Pada 1957 disebutkan bahwa Suharto bersama Soedjono Hoemardhani dibaptis oleh Romo Rama Martapangarsa, seorang spritualis dari Yogyakarta, untuk menjalani “ikatan persaudaran mistikal.” Kemudian sejak bertugas di Markas Besar Angkatan Darat, Suharto sering berdiskusi dengan Romo Mesran Hadi Prayitno, seorang perwira menengah Angkatan Darat yang sama-sama memiliki ketertarikan terhadap spiritualitas Jawa. Kepada Suharto, Mesran menyarankan jika benar-benar ingin mendalami spiritualitas Jawa, Suharto harus bertemu dengan seorang guru bernama Raden Panji Soedijat Prawirokoesomo atau yang lebih dikenal dengan nama Romo Dijat. Pada tahun 1963, Suharto menemui Romo Dijat di Klaten dan menyatakan dirinya sebagai murid Romo Dijat. Sejak saat itu hingga ia menjadi presiden, Suharto selalu menyempatkan diri menemui Romo Dijat di kediamannya di Semarang untuk meminta petuah-petuah spiritual. Maka jadilah Romo Marta, Romo Dijat, Romo Mesran dan Romo Budi bagian dari “ring satu” dunia kebatinan Suharto. Oleh Suharto, mereka dipercayai memiliki kemampuan untuk berdialog dengan roh leluhur melalui teknik meditasi yang dalam bahasa Jawa disebut *njarwa*. Petuah-petuah leluhur yang disampaikan melalui para Romo inilah yang kemudian menjadi salah satu pegangan Suharto dalam pengambilan kebijakan selama masa pemerintahan Orde Baru. Ketika akan mengambil kebijakan intervensi militer terhadap Timor Portugis pun, Suharto disebutkan terlebih dahulu meminta pertimbangan para leluhur melalui perantara para Romo kepercayaan.